



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

I. DATA PRIBADI

- Nama : HELMI ASHARI
- Jabatan : PANITERA
- NHK : 420707

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 985.750.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/90 m2 di KOTA YOGYAKARTA, WARISAN Rp. 985.750.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 98.000.000

- MOBIL, HONDA JAZZ/MINIBUS Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
- MOTOR, HONDA NF 125 TR / SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
- MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
- MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
- MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 28.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 12.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 115.407.791

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 1.211.157.791

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.211.157.791

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.